

Waspada! Jajanan, Jangan Sampai Anak Keracunan dan Luka Bakar

BOGOR (IM)-Orang tua harus mewaspadai penganan/jajanan anak-anak yang akhir-akhir ini marak jajanan tak sehat. Pasalnya, belakangan ini acap kali anak-anak keracunan penganan berbahaya. Kasus keracunan perlu menjadi perhatian serius bagi orang tua, agar mengawasi anaknya. Sebab penganan asal-asalan ini tidak saja meracuni anak-anak kita, juga ditemukan jajanan yang menyebabkan luka bakar yakni jajanan snack atau ciki Ngebul (Gikibul) di sejumlah daerah.

Meskipun kasus serupa tidak terjadi di Kabupaten Bogor, namun Pemerintah Kabupaten Bogor mengimbau kepada para pedagang untuk beralih menjual jajanan sehat, serta meminta kepada para orang tua untuk berhati-hati dan mengawasi anak agar selalu membeli jajanan sehat.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Intan Widayawati melalui sambungan telepon siaran langsung di Radio Tegar Beriman, 95,3 FM. Intan menjelaskan bahwa nitrogen cair yang digunakan dalam makanan selain menghasilkan efek asap ngebul dan sensasi dingin, juga efek nitrogen cair yang terkonsentrasi dapat menyebabkan intansi kulit,

mulut saluran pernafasan dan kerusakan lambung.

Hal itu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM, melalui imbauan dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) ini sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor KL.02/02/C/90/2023 tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair pada Produk Pangan Siap Saji.

Sementara itu, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan adanya gangguan kesehatan akibat Ciki Ngebul di Kabupaten Bogor. Namun dia tetap mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. "Tapi antisipasi harus dilakukan jangan sampai menunggu ada kasus. Untuk itu, saya juga akan meminta dinas-dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah antisipasi," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa isu kejadian keracunan dan luka bakar yang diakibatkan jajanan atau snack ngebul telah terjadi sejak Juli 2022 lalu dan pertama kali terjadi di daerah Ponorogo. Kejadian serupa kembali terjadi pada November 2022 di Tasik dan Desember 2022 terjadi di Bekasi. ● **gio**

Pemkab Bogor Batal Bangun Alun-alun Parungpanjang

CIBINONG (IM)-Nilai Banprov Jabar ke Pemkab Bogor terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada 2021, nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor realisasinya mencapai Rp364,3 miliar. Pada 2023 ini, nilai bantuan keuangan untuk Kabupaten Bogor itu hanya Rp93 miliar saja. Bahkan, nilai Banprov Jabar 2023 ini lebih kecil dibandingkan 2022 lalu yang terhitung sebesar Rp112,6 miliar.

"Nilai Banprov Jabar Kabupaten Bogor pada 2023 ini turun lagi karena di bawah Rp100 miliar," kata Anggota Komisi I DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, kemarin.

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini menuturkan, Banprov Jabar pada tahun ini terfokus dalam pembayaran iuran kesehatan BPJS PBI, sisanya untuk pengadaan alat-alat kesehatan, membenah kawasan kumuh

dan lainnya. Turunnya lagi nilai Banprov Jabar ini, ungkap Kang AW sapaan akrabnya diakibatkan karena kurangnya komunikasi dan juga mungkin karena adanya kerentanan atau rasa was-was.

"Kita tak bisa menafikan permasalahan pembangunan RSUD Bogor Utara, ada rasa was-was dan juga karena komunikasi yang kurang lancar antara yang mengajukan dan mengkonsolidasikan proposal permohonan Banprov ke Gubernur Jawa Barat dan jajarannya," ungkap Kang AW.

Ia menayangkan, kurang dimanfaatkannya peran para legislator, karena Kabupaten Bogor memiliki 12 orang wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Jawa Barat. "Wakil rakyat harusnya juga dilibatkan dalam mengkonsolidasikan tugas yang tidak sederhana, saya harapkan kita bisa bersama-sama dalam membangun Bumi Tegar Beriman," paparnya. ● **gio**



PRODUKSI KACAMATA MATAHARI

Pekerja menyelesaikan produksi kacamata matahari di kompleks Observatorium Bosscha, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (16/1). Observatorium Bosscha bekerjasama dengan penerbit Erlangga memproduksi 3.000 kacamata matahari yang akan dibagikan ke berbagai sekolah di beberapa kota di Indonesia melalui program paket edukasi gerhana matahari total yang akan terjadi pada 20 April 2023 mendatang.

Pemkot Bandung Gunakan Lahan Pasar Caringin untuk Terminal

BANDUNG (IM)-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggunakan lahan seluas 1.018 meter persegi di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk pembangunan terminal.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/1) mengatakan nantinya layanan transportasi umum ke Pasar Caringin akan terintegrasi. Selain itu, menurutnya, layanan parkir bagi warga yang mengunjungi pasar bisa memadai. "Setelah ini kita akan cek dulu ke lapangan. Selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana," kata Ema.

Adapun lahan tersebut merupakan aset yang diserahkan dari pengelola Pasar Induk Caringin sebagai kompensasi ke Pemkot Bandung lewat sertifikat hak pakai. Menurutnya, terminal yang akan dibangun itu berjenis subterminal, sehingga pembangunan

infrastruktur itu bakal menjadi aset tambahan yang dimiliki Pemkot Bandung.

Sementara itu, pemilik Pasar Induk Caringin, Agung Suryamal mengatakan penyerahan sertifikat tersebut sebagai bentuk komitmen pengelola kepada Pemkot Bandung setelah proses sertifikasi tanah selesai. "Tanah tersebut memang dibebaskan dimiliki oleh kami. Alhamdulillah, proses tersebut telah selesai (sertifikat tanah) secara hukum sudah bisa dilaksanakannya," katanya.

Menurut Agung, Pasar Induk Caringin merupakan pasar terbesar dari segi tingkat perdagangan regional, sehingga komitmen penyerahan lahan kepada Pemkot Bandung pun merupakan komitmen untuk terus mendorong pengembangan UMKM dan pedagang di Kota Bandung. "Semoga Caringin menjadi salah satu pusat ekonomi rakyat di Bandung," kata dia. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SATU ABAD OBSERVATORIUM BOSSCHA

Petugas berjalan keluar dari Observatorium Bosscha di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (16/1). Observatorium Bosscha yang diresmikan pada 1 Januari 1923 atas prakarsa K.A.R Bosscha bersama Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging (Perhimpunan Bintang Hindia Belanda) pada tahun ini genap berusia 100 tahun.

Target 2023, Pemkot-DPRD Tanggulangi Banjir Musiman Bogor Utara

Wali Kota Bogor, Bima Arya siap mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan program prioritas pada tahun 2023.

BOGOR (IM)-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor siap menanggulangi banjir musiman di wilayah Bogor Utara. Hal itu tertuang usai digelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara di Saung Dolken, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara pada Senin (16/1) siang.

Wali Kota Bogor, Bima Arya siap mengawal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan program prioritas pada tahun 2023.

"Tahun 2023 semua kembali lagi kepada RPJMD dan target-target program prioritas yang ada di dalam visi dan misi Bima-Dedie. Ada tiga yang sering saya sampaikan dalam priode ini, satu infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi buriokrasi. Makanya kami lihat infrastruktur di Bogor Utara, yang ingin saya tekankan

terkait hal-hal yang darurat seperti banjir terus setiap musim penghujan," ungkap Bima kepada wartawan.

Menurut Bima, penyebabnya salah satunya jembatan model jaman dahulu (jadul) konstruksinya kebawah dan menyumbat sampah, sehingga membuat warga sengsara. Ada juga jalan sempit yang bikin macet seperti simpang indobaso.

"Nah, banjir dan itu betul-betul harus diprioritaskan tahapannya termasuk daerah rawan bencana. Saya tidak mau di akhir tahun ketika meninggalkan amanah di Kota Bogor banyak warga terkena bencana. Jadi pak camat Riki Robiansah, saya ingin diupdate dilaporkan terus ke saya progres itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, Musrenbang ke-

camatan hari ini tindak lanjut dari musrenbang kelurahan, menyusun usulan untuk ke tingkat Kota Bogor. Tapi didominasi usulan infrastruktur, insya Allah dari DPRD membantu mengawal program di Bogor Utara.

"Yang pasti penanganan masalah banjir perlu jadi Cilu, Tanah Baru dan Gibuluh. Kejadian banjir terulang saat musim penghujan, saya yakin bisa diminimalisir dan kami siap dukung juga kawal. Penguatan sentra ekonomi UMKM, karena kuliner, batik dan kerajinan tangan sangat mendominasi," terangnya.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menerangkan, tahun 2023 ini Musrenbang untuk RKPd tahun 2024 ada 64 usulan prioritas dengan 8 kelurahan, masih didominasi oleh pembanguan fisik

terutama turap dan drainase. Turap dibutuhkan memang karena Bogor Utara banyak dialiri sungai dan banyak rumah masyarakat yang ada disekitar sungai sehingga banyak turap yang jebol mengakibatkan banjir lintasan.

"Selain penanganan banjir, ada juga dari bidang pemerintahan, sosial ekonomi seperti pembangunan posyandu. Kami akan melakukan pembinaan semaksimal mungkin baik PNS maupun non PNS di kelurahan dan di kecamatan untuk melakukan pembinaan terkait tupok-sinya. Dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Jadi banyak pembinaan maupun diklat dan kegiatan yang dikordinasikan oleh BKPSDM Kota Bogor," pungkasnya. ● **gio**

LANJUTKAN PEMBANGUNAN RSUD BOGOR UTARA

Pemkab Disarankan Cari Sumber Pendanaan Lain

CIBINONG (IM)-Pemkab Bogor disarankan mencari sumber pendanaan lain untuk melanjutkan proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung di Desa Cogrek, Parung.

Hal itu karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor sebesar Rp93,8 miliar tidak ada yang diperuntukkan untuk membangun RSUD Bogor Utara.

"Jika Pemkab Bogor masih merasa berkewajiban untuk memenuhi visi misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara, silakan dicari sumbernya dari tempat lain," kata Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin (16/1).

Asep Wahyuwijaya menuturkan bahwa tidak dilanjutkannya proyek pembangunan RSUD Bogor Utara tentu

menjadi lain masalahnya, kalau di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor itu sendiri targetnya adalah cukup dibuatkan Klinik Utama Rawat Jalan Parung.

"Kalau visi misi RPJMD hanya terbangunnya Klinik Utama Rawat Jalan Parung. Maka tentu visi misi dan janji politiknya sudah dilunasi," tutur Asep Wahyuwijaya.

Ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan Pemprov (Banprov) Jawa Barat, distribusi paling besar diberikan untuk Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Bogor sebesar Rp43,675 miliar, kemudian untuk pengembangan SPAM Regional Antar Desa dan Pembangunan Tangki Septik Individual sebesar Rp21,575 miliar.

"Juga ada pengadaan media digital di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp12,9 miliar, pembangunan command centre sebesar Rp5 miliar, penataan kawasan kumuh sebesar Rp3,34 miliar, pengadaan alat keseharan untuk

Puskesmas di daerah perbatasan sebesar Rp2,73 miliar, pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas sebesar Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya sebesar Rp1,3 miliar, Bulan Bakti Siliwangi dan Go-tong Royong sebesar Rp625 juta, INI Manunggal membangun desa sebesar Rp600 juta dan peningkatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp448 juta," jelasnya.

Kang AW sapaan Asep Wahyuwijaya menerangkan, meskipun besaran Banprov Jawa Barat semakin menurun, tapi ia melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam. "Karena itu tentunya saya berharap kegiatannya bisa segera ditindaklanjuti secara cepat dan dengan kualitas yang patut agar warga penerima pun dapat segera juga menikmati manfaatnya," terang Kang AW. ● **gio**



IDN/ANTARA

PELESTARIAN BATIK TEHNIK COMPLONGAN

Perajin menyelesaikan proses "complongan" kain batik di Paoman, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/1). Complongan merupakan suatu teknik melubangi kain batik dengan deretan jarum dan dilakukan sebelum kain diwarnai atau setelah kain dilapisi lilin hingga menghasilkan motif khas (Complongan) yang dijual Rp150.000 hingga Rp500.000 per lembarnya.

SUDAH 5 TAHUN RUSAK

Dewan Kab. Cirebon Minta Disdik Segera Perbaiki SDN 1 Gunungsari

CIREBON (IM)-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Hal itu berkaitan dengan bangunan SDN 1 Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, sudah 5 tahun ini bangunan SDN 1 Gunungsari rusak. Alhasil, ratusan murid harus belajar di emper ruang kelas.

Hal ini dikatakan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan. Menurutnya, rusaknya SDN 1 Gunungsari menjadi tugas bersama untuk segera ditangani. Dirinya mengaku miris, karena selama 5 tahun kondisi bangunan hampir ambruk. Sementara, sampai saat ini Disdik Kabupaten Cirebon terkesan tutup mata.

"Harusnya ini menjadi perhatian khusus Disdik Kabupaten Cirebon. Kan sudah lima tahun bangunan rusak parah, masa ia mereka tidak tahu," kata Yoga, Senin (16/1).

Saat itu akunya, sebetulnya sudah mengetahui masalah tersebut saat masih duduk di komisi IV. Namun, sampai sekarang ternyata tidak ada penanganan dari Disdik Kabupaten Cirebon. Dirinyapun meminta Kadisdik Kabupaten Cirebon Ronianto, untuk bertanggung jawab.

Yoga juga mengaku aneh, karena Kadisdik sekarang justru mantan Kabid SD. Harusnya, secara global mengetahui dan ini menjadi persoalan-persoalan yang harusnya ditangani dan diselesaikan sejak dulu. Jangan sampai dalam kurun waktu yang sangat lama baru mencari solusi, dengan menurunkan tim.

"Kemarin kemana saja pak Ronianto. Semenjak dia duduk di Kabid SD kemudian balik lagi ke Disdik dan menjadi Kadisdik, kan itu suatu

permasalahan, harusnya dipilah mana yang menjadi persoalan di disdik," ungkapnya.

Yoga menjelaskan, kalau dikroscek lagi di lapangan, kaitan hal itu masih banyak ditemukan rehab-rehab sedang yang memang sebetulnya masih layak digunakan bangunan tersebut. Untuk itulah, harus ada kolaborasi antara legislatif dan kepala SKPD atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Cirebon.

Dalam hal ini, lanjut dia, anggota dewan ini diberikan kewenangan pokok-pokok pikiran (pokir). Artinya, bisa diarahkan melalui rapat-rapat kerja, mana yang menjadi urgensi yang ada di Kabupaten Cirebon, jangan ini sudah menjadi suatu pemberitaan, menjadi suatu masalah, Disdik baru mencari solusinya.

"Saya menekankan ini menjadi tanggung jawab kepala dinas yang sekarang. Dan ini wajib, harus diselesaikan manakala memang di murninya tidak dianggarkan, ya di perubahan. Diperjuangkan kan begitu, minimal ada suatu keseriusan dalam menangani hal tersebut," paparnya.

Seperti diketahui beberapa bulan lalu, KBM di SDN 1 Gunungsari Kecamatan Waled ramai diberitakan. Sebab, ada lima kelas yakni kelas 2 sampai kelas 5 belajarnya di emper kelas. Hal itu karena kondisi di dalam ruangan yang mengkhawatirkan ambruk dan tembok-temboknya juga sudah rapuh. Kondisi bangunan yang memprihatinkan tersebut, sudah 5 tahun berjalan.

Dari jumlah ratusan murid yang ada di SDN 1 Gunungsari ini, hanya kelas 1 yang KBM-nya di dalam kelas. Sedangkan kelas 6 A, memanfaatkan ruang Posyandu dan kelas 6 B menggunakan ruang kelas madrasah milik desa yang berada dekat dengan SD tersebut. ● **pra**